

Tinjauan Mata Kuliah

Mata kuliah Etika Pemerintahan ini sebagian besar bahan dasarnya diambil dari materi yang pernah ditulis oleh Drs. Bayu Suryaningrat (alm) dari FISIP Universitas Padjadjaran Bandung, tahun 1986 yang pada waktu itu menjadi salah seorang penulis bahan ajar FISIP Universitas Terbuka dalam rangka dibukanya Program Studi Ilmu Pemerintahan yang beberapa tahun kemudian tertunda. Selanjutnya, untuk elaborasi materi dan penelaahan dibentuk tim penyusun materi berasal dari Jurusan Ilmu Administrasi FISIP UT bekerja sama dengan tim IIP Depdagri Jakarta atas tugas dari dekan FISIP UT. Sesudah dilakukan *review* materi dan tambahan materi terhadap bahan dasar tersebut, akhirnya tersusun Buku Materi Pokok (BMP) *Etika Pemerintahan* (IPEM4430) yang dicetak pertama kali pada tahun 1999. Pada tahun 2006, dilakukan revisi untuk pertama kalinya.

Mata kuliah ini secara umum menyajikan materi tentang konsep-konsep etika pemerintahan dan kajian tentang etika pemerintahan dalam filsafat Barat dan Timur (terutama Indonesia) serta aneka masalah pengembangan etika pemerintahan dalam era *good governance* dewasa ini.

Dalam konteks penyelenggaraan negara, etika merupakan nilai-nilai moral yang mengikat seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur sikap, tindakan, ataupun ucapannya dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Suatu profesi selalu memerlukan landasan etika yang menjadi acuan bertindak para anggotanya sehingga citra, kehormatan, dan eksistensi profesinya terjaga. Dengan kata lain, etika profesi merupakan salah satu wujud kontrol terhadap para penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya. Oleh karena itu, bahan ajar/modul ini sangat relevan dalam mendukung penciptaan sikap, perilaku, dan tindakan yang terpuji dan baik dari para penyelenggara negara.

Modul ini dapat dijadikan referensi, acuan, dan pedoman dalam menilai sikap, perilaku, dan tindakan para penyelenggara negara dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sehingga penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik dan akuntabel dapat diwujudkan.

Setelah mempelajari modul ini, kompetensi umum yang harus mahasiswa kuasai adalah mampu menganalisis permasalahan pengembangan etika pemerintahan. Adapun kompetensi khusus yang harus mahasiswa kuasai setelah mempelajari modul ini adalah

1. menjelaskan asal usul etika pemerintahan dan konsep pemerintahan;
2. menjelaskan ajaran filsafat Barat tentang etika pemerintahan;
3. menjelaskan ajaran filsafat Timur tentang etika pemerintahan;
4. menjelaskan perbedaan norma-norma etika dan hukum;
5. menjelaskan perbuatan pemerintah yang tidak patut;
6. menjelaskan asas-asas pemerintahan;
7. menjelaskan persoalan etika jabatan;
8. menjelaskan kode etik penyelenggara negara dan kode etik PNS; serta
9. menganalisis masalah-masalah dalam pengembangan etika pemerintahan.

BMP *Etika Pemerintahan* ini terdiri atas sembilan modul yang berkarakteristik saling menunjang dan sistematis, tetapi masing-masing konsep dalam setiap modul dapat dipelajari secara terpisah (moduler). Mengapa demikian? Hal ini mengingat etika pemerintahan berisi nilai-nilai etika, moral, estetika, dan kajian-kajian lain yang memberikan bekal kejiwaan tentang baik dan buruk dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kehidupan sehari-hari.

Modul 1 menjelaskan asal usul etika pemerintahan dan konsep pemerintahan yang dibagi menjadi dua kegiatan belajar, yaitu pengantar etika pemerintahan serta pengertian pemerintah, pemerintahan, dan pemerintahan yang baik.

Modul 2 menjelaskan ajaran filsafat Barat tentang etika pemerintahan. Mahasiswa diajak untuk mengkaji apa itu filsafat, ajaran filsafat mengenai etika pemerintahan, dan etika pemerintahan menurut filsafat Barat.

Modul 3 membahas etika pemerintahan dalam filsafat Timur yang memberikan pemahaman bahwa di Indonesia juga terdapat filsafat yang murni Indonesia berkaitan dengan etika pemerintahan. Hal tersebut diuraikan sesuai naskah aslinya.

Modul 4 membahas perbedaan norma-norma etika dan hukum yang dibagi menjadi dua kegiatan belajar, yaitu norma-norma etika dan norma-norma hukum.

Modul 5 membahas perbuatan pemerintah yang tidak patut, khususnya mengenai cacat etika pemerintahan yang berkaitan dengan perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah dan perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh pemerintah. Semua perilaku yang tidak terpuji itu dalam modul ini diistilahkan licik.

- Modul 6 membahas asas-asas umum pemerintahan. Hal yang terkandung di dalamnya adalah asas-asas umum pemerintahan yang patut sebagai penangkal penyakit cacat etika pemerintahan, seperti *chichane*, *misbruik van recht*, *misbruik van macht*, atau di Prancis dikenal *detournment de pouvoir*.
- Modul 7 membahas etika jabatan yang merupakan pedoman perbuatan atau perilaku serta kewajiban moral para administrator pemerintahan. Dilihat dari tujuannya, etika pemerintahan mempelajari perilaku para pegawai negeri serta pejabat negara sebagai aparatur pemerintah.
- Modul 8 membahas kode etik penyelenggara negara dan kode etik PNS. Modul ini dibagi dalam dua kegiatan belajar, yaitu etika penyelenggara negara dan kode etik PNS serta penegakan etika penyelenggara negara dan kode etik PNS.
- Modul 9 membahas masalah-masalah pengembangan etika pemerintahan, yaitu transparansi penyelenggaraan pemerintahan, laporan kekayaan penyelenggara pemerintahan, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peniup peluit, dan pemberlakuan peraturan.

Rangkuman isi pembahasan mata kuliah Etika Pemerintahan dikaitkan dengan harapan kurikulum dapat diamati pada skema berikut ini.

Peta Kompetensi
Etika Pemerintahan/IPEM4430/3 sks

